

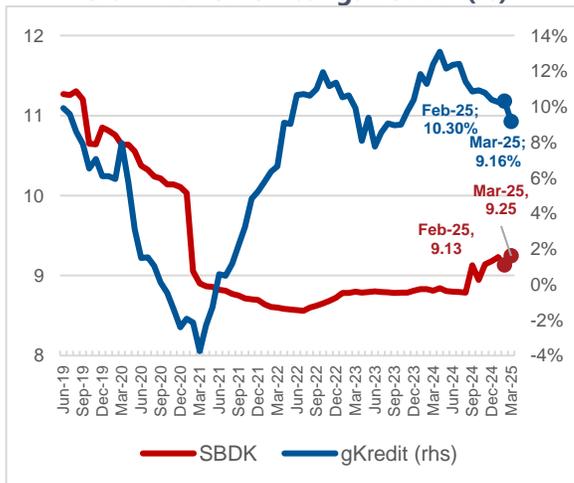
***SBDK Maret 2025 meningkat, akibat kenaikan biaya dana dan biaya overhead.***

- ***SBDK Maret 2025 terpantau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, dikontribusikan oleh kenaikan biaya dana dan biaya overhead.***
- ***Di tengah stabilnya suku bunga kredit agregat pada April 2025, suku bunga kredit baru tercatat meningkat secara bulanan.***
- ***Suku bunga kredit pada mayoritas sektor prioritas KLM mengalami penurunan dalam 6 bulan terakhir, kendati di tengah risiko kredit yang meningkat.***

**Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)<sup>1</sup> Maret 2025**

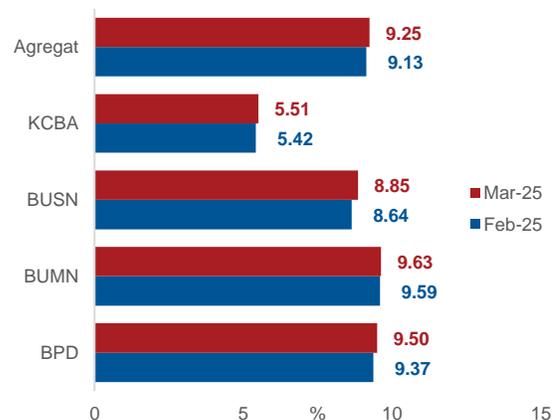
**SBDK Maret 2025 mengalami peningkatan secara bulanan pada seluruh kelompok bank.** SBDK Maret 2025 tercatat sebesar 9,25%, atau meningkat 12 basis poin (bps) dibandingkan Februari 2025 (**Grafik 1**)<sup>2</sup>. Seluruh kelompok bank mengalami kenaikan SBDK secara bulanan, utamanya dikontribusikan kelompok BUSN dengan kenaikan sebesar 21 bps, diikuti oleh kelompok BPD, KCBA dan BUMN masing-masing sebesar 13 bps, 8 bps dan 4 bps (**Grafik 2**). Kenaikan SBDK secara bulanan ini terjadi bersamaan dengan moderasi pertumbuhan kredit dalam satu bulan terakhir.

**Grafik 1. Perkembangan SBDK (%)**



\*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank  
Sumber: OJK (diolah)

**Grafik 2. SBDK Maret 2025\* Berdasarkan Kelompok Bank (%)**



\*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank  
Sumber: OJK (diolah)

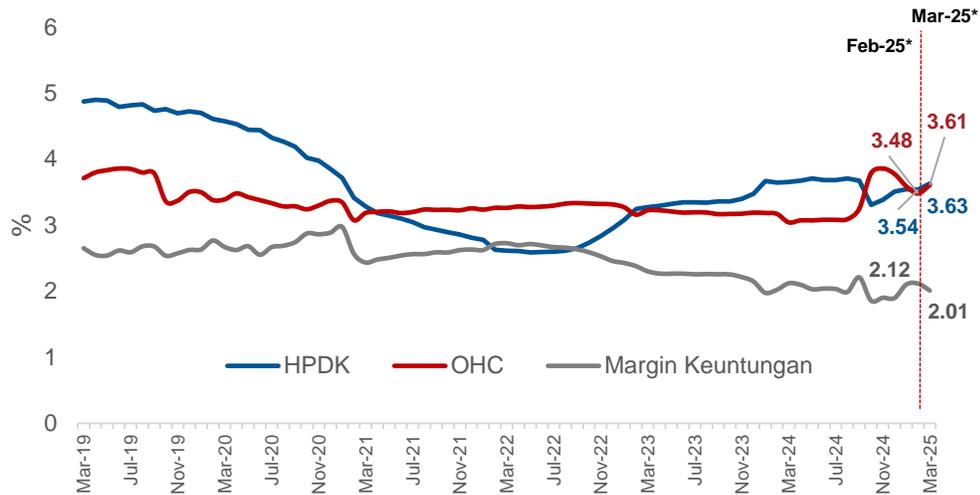
<sup>1</sup> SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk tiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK. Periode asesmen menggunakan data SBDK yang tersedia hingga publikasi laporan.

<sup>2</sup> Sejak Oktober 2024, komponen pembentuk SBDK mengalami perubahan dan penyesuaian, sejalan dengan pengaturan dalam POJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit. Lebih lanjut, angka SBDK Oktober 2024, November 2024 dan Desember 2024 disajikan ulang sejalan dengan koreksi data yang disampaikan bank pelapor pada periode dimaksud.

### Perkembangan Komponen SBDK<sup>3</sup>

**Kenaikan SBDK Maret 2025 didorong oleh kenaikan biaya dana dan biaya overhead.** Kontribusi biaya overhead dan biaya dana pada pembentukan SBDK relatif berimbang. Biaya overhead mengalami kenaikan sebesar 13 bps secara bulanan menjadi 3,61%, sedangkan biaya dana atau Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) mengalami kenaikan sebesar 9 bps secara bulanan menjadi 3,63%. Di sisi lain, bank menurunkan margin keuntungan sebesar 11 bps secara bulanan menjadi 2,01%, sebagai upaya menjaga daya saing di pasar kredit (**Grafik 3**).

**Grafik 3. Perkembangan Komponen Pembentuk SBDK\* (%)**



\*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

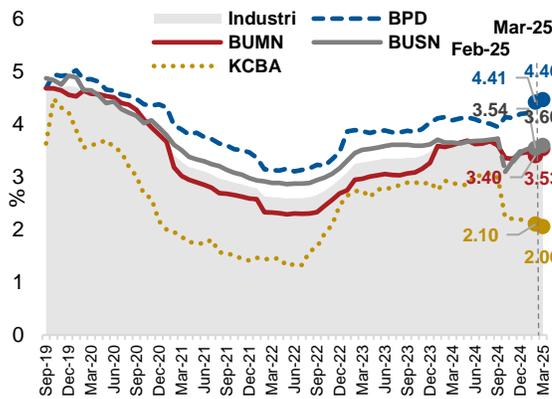
**Mayoritas kelompok bank mengalami kenaikan HPDK secara bulanan, kecuali KCBA.** Kenaikan HPDK terbesar dialami kelompok BUMN sebesar 14 bps menjadi 3,53%, diikuti dengan kelompok BPD dan BUSN dengan kenaikan sebesar 5 bps menjadi sebesar 4,46% dan 3,60%. Di sisi lain, HPDK pada kelompok KCBA mengalami penurunan terbatas sebesar 4 bps menjadi 2,06% (**Grafik 4**). Kenaikan kebutuhan likuiditas menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (KBKN) di akhir Maret 2025 dan persaingan antarbank di pasar dana terindikasi berkontribusi pada kenaikan HPDK tersebut. Kelompok KCBA terindikasi memiliki keunggulan kompetitif karena memiliki likuiditas yang lebih tinggi (AL/DPK April 2025 sebesar 108,16%) sehingga berhasil menjaga tingkat suku bunga dana pada level terendah dibandingkan kelompok bank lainnya, sedangkan kelompok BPD memiliki daya saing terendah sebagaimana tecermin pada tingkat suku bunga dana yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

**Biaya overhead (OHC) mengalami kenaikan secara bulanan pada seluruh kelompok bank yang dikontribusikan oleh faktor siklikal.** Kenaikan OHC yang diperkirakan bersifat temporer utamanya dikontribusikan oleh kelompok BUSN yang meningkat sebesar 16 bps, diikuti oleh kelompok BPD, BUMN dan KCBA dengan kenaikan yang lebih moderat, berturut-turut sebesar 12 bps, 11 bps dan 11 bps (**Grafik 5**). Faktor siklikal diperkirakan berkontribusi pada kenaikan OHC secara bulanan, yaitu pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan penarikan uang kartal untuk Idul Fitri 2025 yang jatuh pada akhir Maret 2025 sehingga berkontribusi pada kenaikan beban tenaga kerja.

<sup>3</sup> SBDK terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk, yaitu (i) Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang terdiri dari DPK (Biaya DPK, biaya giro wajib minimum, biaya premi LPS) dan Biaya non-DPK (Biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia dan bank lain, Biaya surat-surat berharga yang diterbitkan, Biaya dana pinjaman yang diterima, dan lainnya); (ii) Biaya overhead (OHC) yang terdiri dari Perubahan nilai wajar liabilitas, Kerugian risiko operasional, Komisi/provisi/fee dan administrasi, Penyusutan/amortisasi, kerugian penurunan nilai aset non-keuangan, Beban tenaga kerja, Beban promosi, Kerugian penjabaran tansaksi valas, Beban lainnya, Biaya overhead lainnya; (iii) Margin keuntungan, yang ditetapkan oleh bank dalam penyaluran kredit.

Sejalan dengan kenaikan OHC dan HPDK, margin keuntungan pada mayoritas kelompok bank mengalami penurunan, kecuali pada KCBA. Kelompok BUMN mengalami penurunan margin keuntungan yang terbesar yaitu 21 bps secara bulanan ke level 2,05%, di tengah penurunan margin keuntungan yang lebih terbatas pada kelompok BPD dan BUSN masing-masing sebesar 4 bps dan 1 bps. Kelompok BUMN terindikasi berupaya menjaga daya saing di pasar kredit, karena hanya sebagian kecil dari kenaikan HPDK dan OHC yang ditransmisikan dalam bentuk kenaikan SBDK, sebagaimana terlihat pada besaran kenaikan SBDK secara bulanan yang paling rendah dibandingkan kelompok bank lainnya. Sementara itu, margin keuntungan kelompok KCBA meningkat sebesar 2 bps dipicu keunggulan kompetitif dalam memperoleh sumber biaya dana yang lebih murah (Grafik 6).

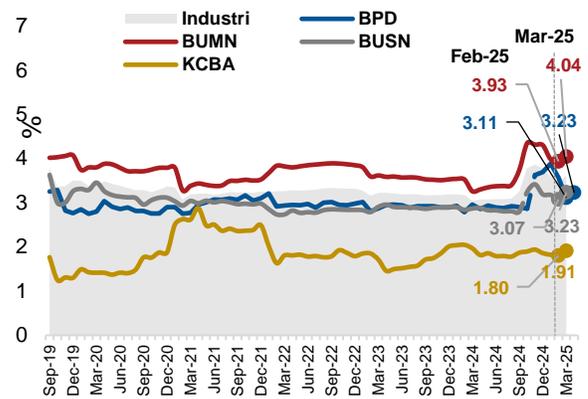
**Grafik 4. Perkembangan HPDK\* Berdasarkan Kelompok Bank (%)**



\*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

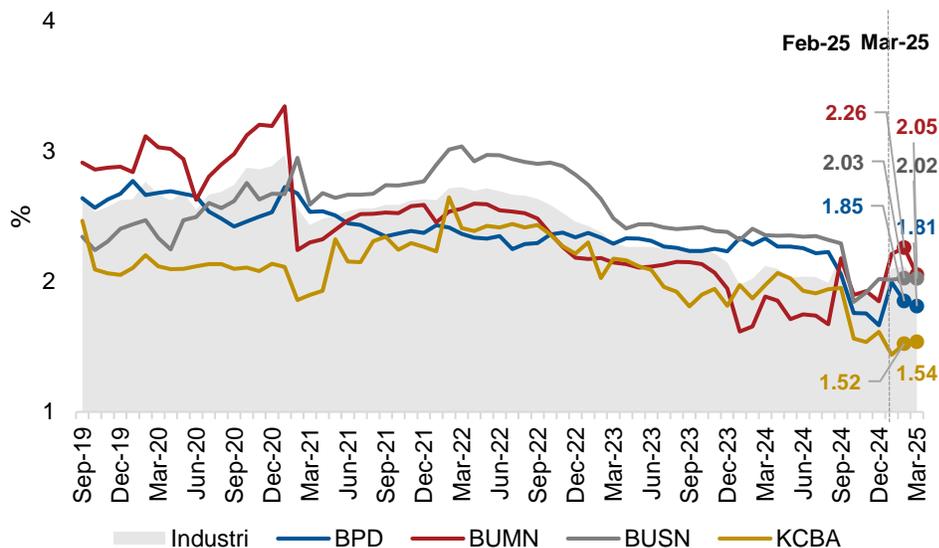
**Grafik 5. Perkembangan OHC\* Berdasarkan Kelompok Bank (%)**



\*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

**Grafik 6. Perkembangan Margin Keuntungan\* Berdasarkan Kelompok Bank (%)**



\*Berdasarkan ketentuan baru dengan penyesuaian revisi bank.

Sumber: OJK (diolah)

## Perkembangan Suku Bunga Kredit

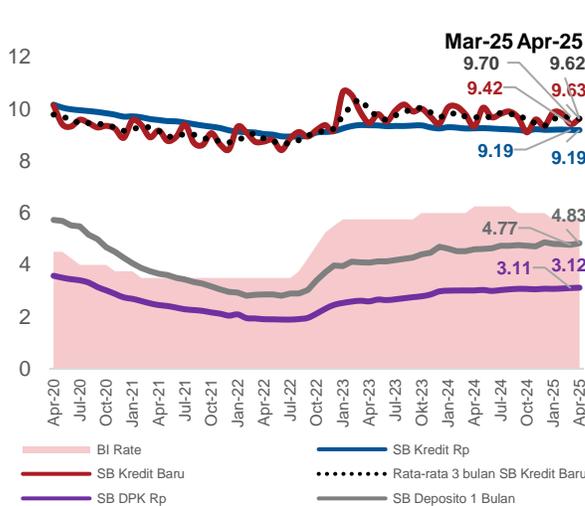
Suku bunga kredit baru pada April 2025 mengalami peningkatan secara bulanan, kendati suku bunga kredit agregat relatif stabil.<sup>4</sup> Meskipun rata-rata tertimbang suku bunga kredit Rupiah

<sup>4</sup> Suku bunga kredit baru adalah tingkat harga yang ditetapkan kreditur atas fasilitas kredit baru.

terpantau stabil sebesar 9,19% pada April 2025, namun suku bunga kredit untuk fasilitas kredit baru (suku bunga kredit baru) mengalami peningkatan sebesar 21 bps secara bulanan menjadi 9,63% (**Grafik 7**). Kenaikan suku bunga kredit baru terjadi pada mayoritas kelompok bank, kecuali BUMN. Kenaikan suku bunga kredit baru terjadi pada kelompok KCBA, BPD, dan BUSN masing-masing sebesar 64 bps, 48 bps, dan 39 bps (**Grafik 8**). Sebaliknya, suku bunga kredit baru pada kelompok BUMN tercatat menurun sebesar 30 bps secara bulanan, terindikasi sebagai upaya menjaga daya saing di pasar kredit.

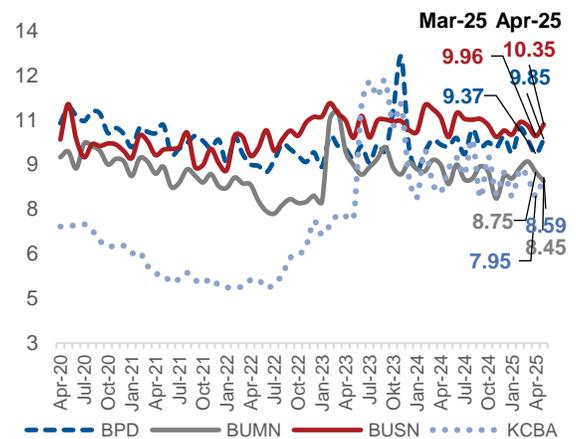
**Dari sisi pendanaan, intensitas kompetisi antarbank dalam aktivitas penghimpunan dana terindikasi lebih moderat.** Kondisi ini tercermin dari suku bunga DPK Rupiah hanya meningkat 1 bps dari bulan sebelumnya ke level 3,12% pada April 2025. Moderasi persaingan di pasar dana tersebut relatif sejalan dengan suku bunga kebijakan (BI-Rate) yang mengalami penurunan sebesar 25 bps pada Januari 2025. Ke depan, prospek penurunan suku bunga dana dan suku bunga kredit diperkirakan berlanjut sesuai dengan ekspektasi penurunan suku bunga global.

**Grafik 7. Perkembangan Suku Bunga Kredit Rp dan Suku Bunga DPK Rp (%)**



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

**Grafik 8. Perkembangan Suku Bunga Kredit Baru Berdasarkan Kelompok Bank (%)**



Sumber: LBUT Antasena (diolah)

## Suku Bunga Kredit Sektor Prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)<sup>5</sup>

**Suku bunga kredit pada mayoritas sektor prioritas KLM relatif menurun dan tergolong kompetitif, kendati di tengah penurunan kualitas kredit.** Kondisi ini mengindikasikan persepsi risiko bank yang masih positif terhadap sektor prioritas KLM. Suku bunga kredit pada mayoritas sektor KLM tergolong lebih rendah dari agregat industri keseluruhan, sebagaimana ditunjukkan oleh sektor TPEK<sup>6</sup>, Green, dan Konstruksi (**Grafik 9**). Adapun sektor yang mengalami penurunan suku bunga kredit diantaranya PPIP<sup>7</sup>, TPEK, dan Green yang masing-masing menurun sebesar 4 bps, 3 bps dan 2 bps. Sementara itu, sektor konstruksi relatif stabil di level 7,15%. Secara bulanan, seluruh sektor KLM mencatatkan penurunan kualitas kredit (**Grafik 10**). Meskipun demikian, rasio NPL tersebut tergolong

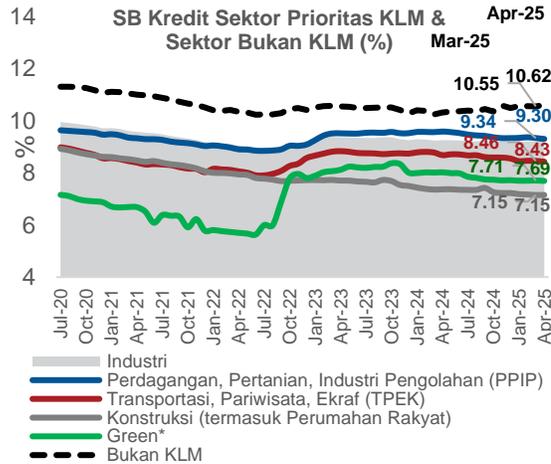
<sup>5</sup> Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur Oktober 2024, sektor prioritas yang ditetapkan untuk memperkuat KLM antara lain: (1) sektor Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan; (2) sektor Transportasi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif (Ekraf); (3) sektor Konstruksi (termasuk Perumahan Rakyat); (4) dan sektor Hijau atau Green. Selain sektor prioritas di atas, kebijakan KLM juga menysasar segmen UMKM dan Usaha Mikro (UMi). Penguatan cakupan sektor dan segmen prioritas tersebut akan berlaku sejak Januari 2025.

<sup>6</sup> TPEK = Transportasi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif (Ekraf)

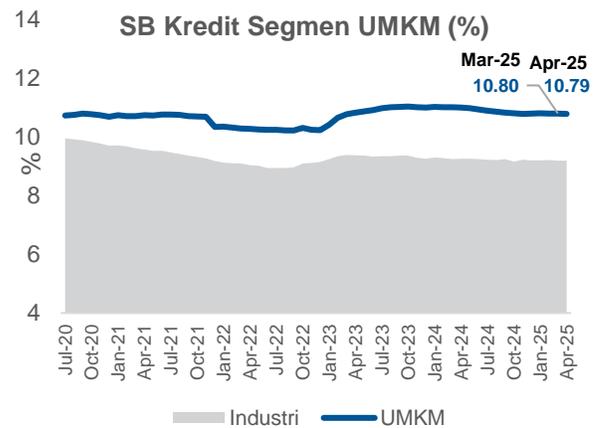
<sup>7</sup> PPIP = Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan

rendah karena di bawah batas prudensial 5%. Adapun suku bunga kredit pada sektor UMKM juga bergerak stabil di tengah kenaikan risiko kredit.

**Grafik 9. Perkembangan Suku Bunga Kredit Pada Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM**

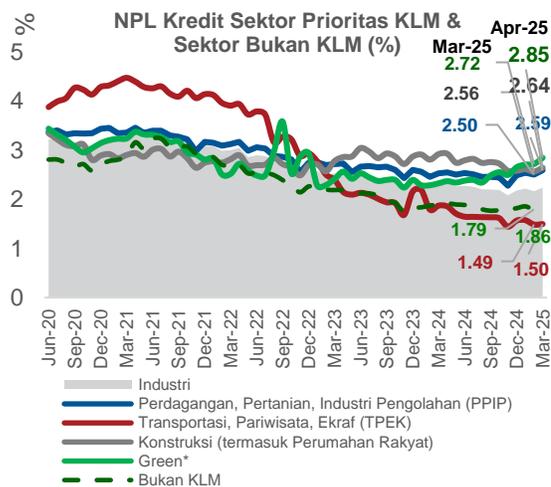


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

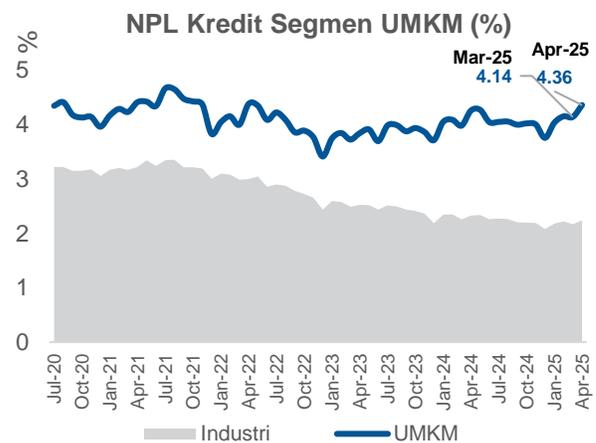


Sumber: LBUT Antasena (diolah)

**Grafik 10. NPL Kredit Sektor Prioritas KLM dan Segmen UMKM**



Sumber: LBUT Antasena (diolah)



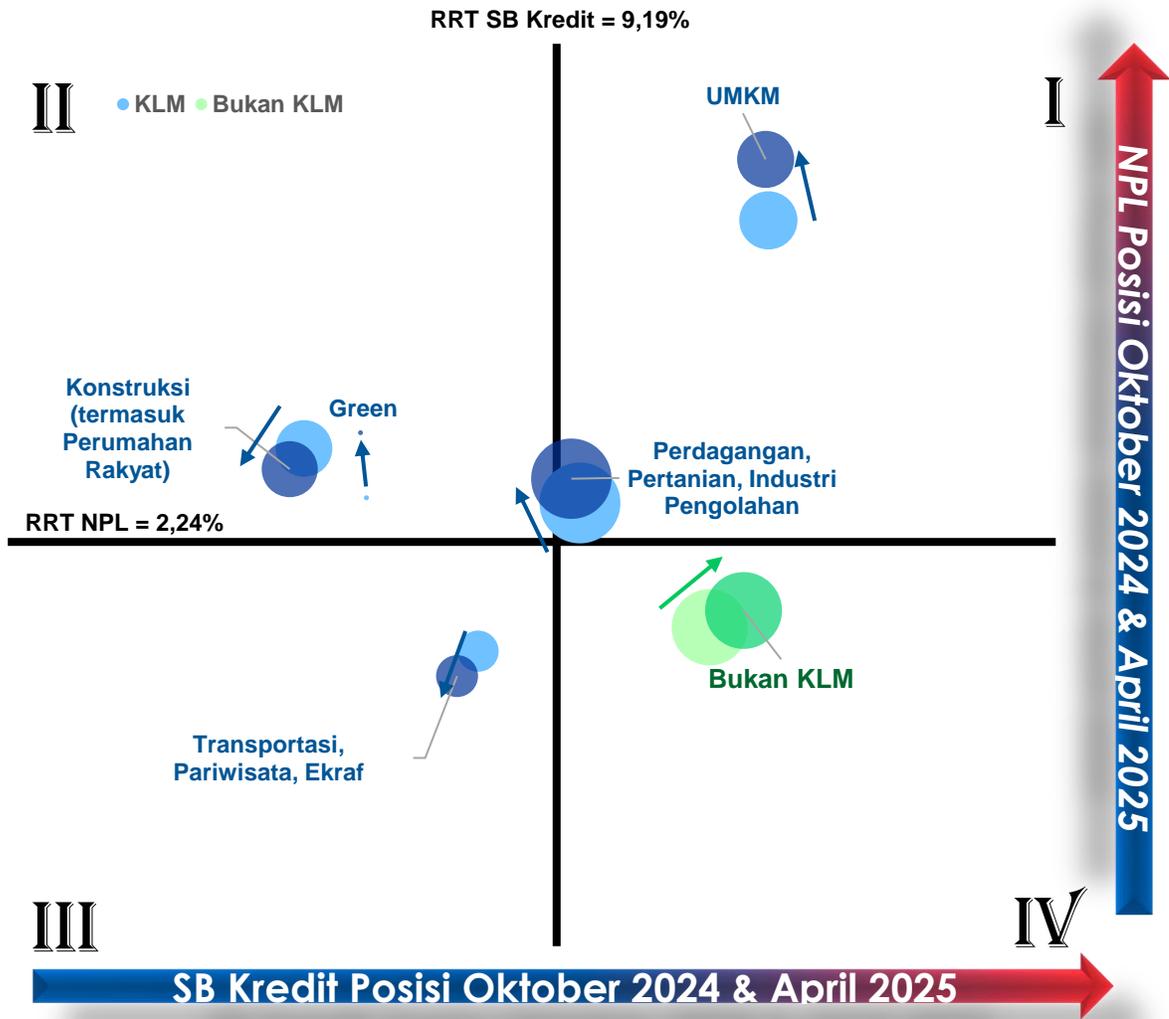
Sumber: LBUT Antasena (diolah)

**Keterangan:**

\*Suku bunga sektor Hijau/Green untuk sub-sektor KPR dan KKB Hijau menggunakan asumsi rerata suku bunga pada KPR dan KKB Hijau dari bank-bank yang digunakan sebagai sampel.

**Dalam perspektif yang lebih panjang (enam bulan terakhir), suku bunga kredit pada sektor prioritas KLM mengalami penurunan, meskipun dengan risiko kredit relatif meningkat.** Seluruh suku bunga kredit segmen prioritas KLM mengalami penurunan (menuju kuadran II dan III). Mayoritas suku bunga kredit pada sektor prioritas KLM yang lebih rendah dibandingkan suku bunga industri mengindikasikan efektivitas kebijakan KLM dalam mendorong kredit pada sektor-sektor prioritas, melalui insentif likuiditas. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa insentif KLM mendukung pembentukan suku bunga yang lebih kompetitif sehingga meningkatkan daya saing bank dalam melakukan intermediasi kepada dunia usaha. Namun demikian, terdapat peningkatan risiko kredit pada beberapa sektor prioritas KLM seperti PPIP dan Green (menuju kuadran I dan II). Perkembangan berbeda terjadi pada sektor non-KLM dan UMKM yang cenderung mengalami kenaikan suku bunga kredit yang diiringi penurunan kualitas kredit.

Grafik 11. Kuadran Pemetaan Suku Bunga dan NPL Sektor dan Segmen Prioritas KLM



- Kuadran I:** suku bunga tinggi, NPL tinggi
- Kuadran II:** suku bunga rendah, NPL tinggi
- Kuadran III:** suku bunga rendah, NPL rendah
- Kuadran IV:** suku bunga rendah, NPL tinggi

**Keterangan:**

*Ukuran bubbles* menunjukkan pangsa kredit.

Arah panah pada *bubbles* menunjukkan pergerakan dari Oktober 2024 ke April 2025.

**Sumber:** LBUT Antasena (diolah)

Tujuan dari transparansi asesmen SBDK adalah untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh informasi terkait perkembangan suku bunga dasar kredit perbankan dan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank. Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit, dalam bentuk penetapan suku bunga kredit yang kompetitif dan efisien, diharapkan akan mampu menopang permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi.

Sebagai langkah awal, Bank Indonesia (BI) menyusun publikasi “Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan.” Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan suku bunga dasar kredit masing-masing bank yang bersifat spesifik untuk tiap bank, antara lain Harga Pokok Dana untuk Kredit, biaya *overhead*, dan margin keuntungan. Meskipun faktor-faktor tersebut cukup beragam, publikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai gambaran atas suku bunga dasar kredit perbankan Indonesia, termasuk informasi statistik distribusi suku bunga dasar kredit. Melalui publikasi asesmen ini, disamping mendorong transmisi kebijakan moneter agar lebih efektif, BI juga berupaya untuk memperluas diseminasi informasi kepada konsumen kredit baik korporasi maupun rumah tangga. Selain itu, publikasi ini bertujuan meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi dalam pembentukan suku bunga dasar kredit perbankan sehingga suku bunga dasar kredit yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dalam mendorong permintaan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Publikasi serupa merupakan sebuah praktik internasional yang sering dijumpai. Bank sentral negara lain seperti di Malaysia, India, dan Tiongkok juga meluncurkan kebijakan transparansi suku bunga kredit melalui publikasi *External Benchmark Rate*, *Loan Prime Rate*, dan *Base Rate*. IMF juga meminta tiap negara anggota untuk menyampaikan *Reference Lending Rate* dan *Reference Deposit Rate* untuk dipublikasikan sebagai selisih referensi suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan, yang merupakan salah satu *Financial Soundness Indicator* (FSI).